Mahasiswa Polsa Terima Bantuan UKT

PURWOREJO (KR) - Sebanyak 181 mahasiswa Politeknik Sawunggali Aji (Polsa) Kutoarjo menerima bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) SPP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Bantuan diterima untuk mahasiswa aktif semester 3 dan 5 yang terdampak Covid-19, selama satu semester pada semester gasal 2020 - 2021. Direktur Polsa Kutoarjo Sapta Aji Srimargiutomo SKom MM mengatakan, bantuan tersebut sangat membantu keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang kesulitan finansial akibat pandemi. Bantuan untuk setiap mahasiswa penerima senilai Rp 2.400.000 untuk satu semester. "Alhamdulillah kuota dari Kemendikbud untuk mahasiswa kami cukup besar, ada 52 persen mahasiswa yang mendapat bantuan UKT/SPP itu," ungkapnya, Senin (3/8). Polsa mengusulkan 200 mahasiswanya untuk mendapat UKT/SPP itu. Hanya mahasiswa yang berasal dari keluarga penerima bantuan PKH, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau keluarga dengan penghasilan gabungan orang tua/wali maksimal Rp 4.000.000/bulan.

Mahasiswa harus membuat pernyataan bahwa orang tua/walinya mengalami kendala finansial akibat pandemi Covid-19. "Bantuan tidak boleh untuk mahasiswa yang mendapat program bidik misi dan dapat beasiswa lainnya. Kemendikbud melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI melakukan verifikasi terhadap usulan kami dan disetujui 181 mahasiswa," terangnya. Selain UKT/SPP, Polsa juga mendapat alokasi beasiswa KIP Kuliah untuk 36 mahasiswa baru. Pemerintah membiayai kuliah selama enam semester atau tiga tahun belajar di Polsa, serta mendapat bantuan biaya hidup Rp 700.000/bulan. (Jas)

Atasi Covid-19, Purworejo Terapkan PJJ

PURWOREJO (KR) - Kabupaten Purworejo yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai zona hijau Covid-19, kini statusnya kembali naik menjadi zona kuning. Menyusul banyaknya kasus baru positif Covid-19, bahkan ada yang meinggal dunia. Menyikapi kondisi ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) mengambil kebijakan untuk proses belajar mengajar (PBM) tahun pelajaran 2020/2021 tetap dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ). "Saat ini Purworejo kembali memasuki zona kuning, sehingga pembelajaran kembali dilakukan melalui PJJ secara daring maupun luring," kata Kepala Disdikpora Purworejo Dr Sukmo Widi Harwanto SH MH, Senin (3/8). Merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, ada dua metode pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Bagi daerah yang masuk zona merah dan kuning dilakukan melalui PJJ, baik dengan daring, luring maupun kombinasi. "Untuk wilayah yang masuk zona hijau bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap," jelasnya.

Hal itu juga terungkap dalam gelar forum dengar aspirasi masyarakat atau Critical Voice Point (CVP) dengan tema kebijakan proses belajar mengajar Kabupaten Purworejo di era pandemi Covid-19, yang dilakukan secara online. Hanya saja lanjut Sukno Widi Harwanto, ada beberapa hambatan dengan sistem PJJ ini, diantaranya tidak semua wilayah di Purworejo memiliki akses internet yang baik dan stabil. Tidak semua siswa memiliki fasilitas android, laptop maupun komputer yang memadai dan biaya kuota internet yang meningkat. (Nar)

Bonorowo Bakal Dijadikan Sentra Ikan

KEBUMEN (KR) - Kecamatan Bonorowo akan dikembangkan menjadi sentra perikanan air tawar di Kabupaten Kebumen. Perhatian juga diberikan pada Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Rowo di Kecamatan Mirit dengan rencana pengembangan menjadi objek wisata. Rencana tersebut disampaikan Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz saat panen ikan gurame di Desa Tlogorejo, Kecamatan Bonorowo, serta meninjau aktivitas TPI Rowo di Desa Rowo, Kecamatan Mirit, Sabtu (1/8). Di Desa Rowo, bupati juga mencoba susur Sungai Wawar menggunakan perahu. Susur sungai menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan selain menyaksikan aktivitas nelayan di TPI Rowo. "Ada 8 kelompok pembudidaya ikan air tawar yang tersebar di 8 desa di Kecamatan Bonorowo. Produksinya cukup melimpah, seperti ikan gurame, nila, dan lele. Kalau ingin ikan yang masih segar, bisa datang ke Bonorowo," ujar Yazid saat panen ikan gurame bersama Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.

Ketua Forum Pembudidaya Ikan (FPI) Kecamatan Bonorowo, Wibisono Susanto, menyampaikan potensi produksi ikan gurame di Kecamatan Bonorowo mencapai 10 ton. Budidaya gurame didukung program bantuan Pemkab Kebumen pada beberapa tahun lalu, berupa hibah sarana dan prasarana, pompa air, kolam terpal, benih dan pakan ikan. (Suk)

Rumah Terbakar, Tinggal di Rumdin Kapolsek

KEBUMEN (KR) - Polisi mengevakuasi Manisih (55), janda sebatang kara warga Desa Bagung, Kecamatan Prembun, yang rumah berikut perabotannya ludes dilalap api. Manisih untuk sementara tinggal rumah dinas Kapolsek Prembun AKP Tejo Suwono. "Ibu Manisih akan tinggal di rumah dinas hingga rumahnya bisa tempat lagi. Selama di rumah dinas, semua kebutuhan hidup kami tanggung bersama para dermawan," ujar AKP Tejo Suwono, Senin (3/8). Karena rumah dinas digunakan untuk hidup sementara Manisih, AKP Tejo rela *nglaju* atau pergi-pulang dari rumahnya di Purworejo. "Semua yang saya lakukan semata-mata untuk membantu sesama," ujarnya.

Kapolres Kebumen AKBP Rudy Cahya Kurniawan mengapresiasi tindakan AKP Tejo. "Apa yang dilakukan Kapolsek Prembun menjadi bagian dari program Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, yakni Poldas Jateng Hadir. Kita harus hadir di tengah masyarakat dengan memberi solusi," jelas AKBP Rudy. (Suk)

Rumah Manisih yang ludes terbakar.

Bupati Grobogan Berharap Pemilukada Berjalan Lancar

GROBOGAN BERSEMI

GROBOGAN (KR) - Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM berharap, meski saat ini masih mengalami pandemi Covid-19, pelaksanaan Pemilukada di daerahnya bisa berjalan lancar dan sukses. Kepada kepala desa yang bersinggungan langsung kepada masyarakat diminta bisa menyampaikan bahwa Pemkab Grobogan bersama penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu telah menyiapkan peraturan protokolnya termasuk perlindungan bagi penyelenggara, pengawas, pengaman, dan pemilih.

"Sehingga pada saatnya nanti, siapapun tidak perlu was-was, dan juga diharapkan patuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Dengan demikian, masyarakat akan merasa aman dalam menggunakan hak pilihnya," ujarnya didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Protkompim) Drs H Teguh

Harjukusuma MSi, Senin (3/8).

Dikatakan, pelaksanaan Pemilukada serentak secara nasional akan diikuti oleh 270 daerah, termasuk salah satunya adalah Grobogan. Rencana awalnya pemungutan suara dilaksanakan 23 September 2020. Namun harus ditunda karena pandemi Covid-19. Sehingga beberapa negara juga menyikapi proses pemilu dengan beberapa opsi, antara lain dengan tetap melaksanakan sesuai jadwal, menunda atau membatalkan. Untuk Indonesia sendiri mengambil opsi menunda, yaitu ditunda pelaksanaannya menjadi tanggal 9 Desember 2020.

"Beberapa pertimbangan kenapa opsi menunda dipilih Indonesia. Diantaranya, kita semua tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Selain itu proses Pemilukada juga harus berjalan guna menghindari

ketidakpastian kepemimpinan daerah yang dapat bermuara pada terkenalnya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," jelas bupati. Oleh karena itulah, lanjut bupati, Pemilukada tahun ini memiliki tantangan baru karena harus dapat berjalan secara luber, jujur dan aman dari Covid-19.

Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM ketika memberi sambutan pada acara sosialisasi Pilkada.

COVID-19 MOMENTUM ASAH SOLIDITAS MANAJEMEN RS

Kunjungan Pasien Umum Menurun Ganggu 'Cash Flow'

SEMARANG (KR) - Kunjungan pasien umum yang menurun berdampak signifikan sehingga mengganggu *cash flow* rumah sakit (RS). Sementara, rumah sakit harus menyediakan ruang isolasi dan fasilitas tambahan untuk pelayanan pasien Covid-19. Karena itu selain budaya kerja yang baik agar tenaga kesehatan tidak terpapar, rumah sakit harus punya ketahanan finansial serta leadership yang baik dalam arti tidak sekadar dokter namun juga memiliki manajemen.

Hal tersebut terungkap dalam covid-talk yang diselenggarakan MCCC PP Muhammadiyah, baru-baru ini. Diskusi bertema 'Praktik Baik Manajemen Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyiyah' menghadirkan narasumber Ketua MPKU PWM Jatim sekaligus Dosen FK UM Surabaya dr Sholihul Absor MKes, Ketua MPKU PWM Jateng dr H Ibnu Naser Ar Rokhimi

Sag MMR dan Ketua MKPU DIY dr H Ahmad Faesol SPRad MKes MMR.

Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jateng dr H Ibnu Naser Ar Rokhimi Sag MMR mengatakan, Muhammadiyah Aisyiyah perlu membuat peta rumah sakit yang ada baik bertipe B, C dan D. Dengan peta tipe kemandirian layanan

spesialis ini akan bisa menjadi etim penyerang dan menjadi gawang penyalamat keuangan rumah sakit. Saat ini, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyiyah (RSMA) yang melaksanakan penanganan Covid-19 di Jateng sebagian besar bertipe C, D. Yang bertipe B hanya RS PKU Muhammadiyah Surakarta. "Wabah Covid-19 merupakan momentum untuk mengasah ketangguhan

soliditas manajemen rumah sakit," katanya.

Dalam menghadapi situasi saat ini RSMA menurut Ibnu Naser harus ada upaya untuk memastikan tim, apa yang menjadi kriteria unggulan pelayanannya. Dengan demikian akan bisa menyiapkan SDM pemegang dengan strategi terbaik adalah menyenangi. Karena jika bertahan saja maka lama-lama akan eboboli juga.

Ketenangan Psikologis
Sedang Direktur RS PKU Muhammadiyah Gamping Ahmad Faesol mengakui manajemen selain mengurus pasien yang masuk juga berusaha memberikan ketenangan psikologis pegawai. Diakui atau tidak menu-
rutnya dampak psikologis

karena rasa ketakutan tertular, juga melanda para nakes. Dari aspek finansial, Ahmad Faesol menyatakan pendapatan rumah sakit praktis turun karena tingkat kunjungan pasien umum turun kurang lebih 47% sehingga berdampak pada kondisi finansial rumah sakit.

"Sementara untuk biaya operasional naik karena dengan membuat ruang isolasi khusus biayanya tidak sedikit, belum lagi biaya operasional juga tidak sedikit," tambahnya. Sedang dr Sholihul Absor MKes mengatakan, secara umum semua rumah sakit mengalami penurunan jumlah pasien umum yang berdampak signifikan sehingga mengganggu *cash flow* rumah sakit. (Fsy)

Pembayaran Tagihan Air PDAM Kembali Normal

KLATEN (KR) - Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten yang memberikan keringanan pembayaran tagihan rekening air kepada pelanggan PDAM Tirta Merapi selama tiga bulan telah berakhir. Selanjutnya, mulai Agustus pembayaran tagihan rekening air kembali normal. "Sesuai dengan surat keputusan (SK) bupati untuk pemberian keringanan pada pelanggan khususnya yang terkait dengan Covid-19 sampai bulan Juli ini sudah berakhir. Dengan demikian nanti pembayaran pada bulan Agustus sudah normal kembali," kata Direktur Utama PDAM Tirta Merapi, Irawan Margono, Minggu (2/8).

Irawan menjelaskan, pembayaran tagihan rekening air kembali normal berdasarkan beberapa faktor, salah satunya kondisi dan situasi di masyarakat, khususnya pelanggan yang juga sudah dalam keadaan normal. Sehingga tidak perlu lagi memberikan keringanan.

"Kita melihat perkembangan kondisi dan situasi dan suasana masyarakat Klaten, khususnya pelanggan sudah normal. Ditetapkannya new normal, kita mempedomani itu. Artinya, tidak diperpanjang. Sudah kita sosialisasikan secara masif," jelasnya.

Irawan menambahkan, total diskon yang diberikan kepada pelanggan selama tiga bulan mencapai sekitar Rp 3 miliar,

atau rata-rata Rp 1 miliar per bulan. Hal ini dirasa cukup membantu meringankan pelanggan ditengah pandemi Covid-19. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah sangat membantu meringankan, paling tidak selama tiga bulan ini. Respons dari pelanggan sangat positif.

Sebelumnya, PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten memberikan keringanan pembayaran tagihan rekening air guna membantu beban masyarakat pelanggan ditengah situasi darurat Covid-19. Total jumlah pelanggan yang diberikan keringanan ada sebanyak 42.680 atau 95% dari jumlah pelanggan PDAM Tirta Merapi. Rinciannya, RT1 ada 1.095 pelanggan, RT2 ada 29.332 pelanggan, RT3 ada 10.246 pelanggan, dan RTB ada 2.008 pelanggan.

Besaran keringanan tagihan rekening air yakni 70% untuk kelompok pelanggan sosial dan rumah tangga 1 (RT1); 40% untuk kelompok pelanggan rumah tangga 2 (RT2); 20% untuk kelompok pelanggan rumah tangga 3 (RT3); dan 10% untuk kelompok pelanggan rumah tangga semi niaga (RTB). Keringanan tagihan rekening air tersebut berlaku pada bulan April, Mei, dan Juni 2020. Sedangkan tagihan tersebut dibayarkan mulai Mei, Juni, dan Juli 2020. Sehingga untuk bulan selanjutnya kembali normal atau tanpa diskon. (Lia)

Hati-hati Terapkan Pembelajaran Tatap Muka

KOMISI E
DPRD Jateng minta kepada Pemprov Jateng agar berhati-hati dan tidak gegabah dalam menerapkan sistem pembelajaran tatap muka bagi siswa di sekolah di tengah pandemi Covid 19. Dikhawatirkan jika kebijakan tersebut diberlakukan, akan menjadi cluster baru covid-19 di sekolah.

Jika Pemprov Jateng benar-benar menerapkan sistem pembelajaran tatap muka, kebijakan tersebut dinilai sangat membahayakan baik bagi siswa maupun para guru pengajarnya. Apalagi saat ini angka kasus Covid-19 di Jateng masih terus naik. Sesuai data dari corona.jatengprov.go.id per Sabtu 1 Agustus pukul 12.00, jumlah kasus positif Covid-19 di Jateng mencapai 9.668 dan 868 orang di antaranya meninggal dunia. Jumlah pasien yang dirawat ada 3.097 orang dan sembuh 5.703 orang.

Covid 19 tidak hanya rentan pada orang dengan usia tua atau yang sudah punya penyakit bawaan. Covid-19 juga rentan menyerang anak-anak. Justru anak-anak bisa menjadi orang tanpa gejala dan menularkan Covid-19 pada orang di

Yudi Indras Wiendarto.

lingkungannya. Pembelajaran daring memang kurang efektif jika dibandingkan pembelajaran tatap muka antara guru dan murid. Namun, pembelajaran tatap muka dinilai membahayakan kesehatan siswa. Pembelajaran tatap muka bisa saja dilakukan dengan catatan angka kasus Covid-19 menurun atau setidaknya tak mengalami lonjakan.

Solusinya adalah memberikan materi pembelajaran daring dengan lebih baik. Sambil menunggu vaksin yang sedang dibuat oleh pemerintah. Harapannya awal 2021 sudah tersedia vaksin. Konten harus lebih kreatif dan menarik. Guru juga harus diberikan kemampuan itu. KBM saat ini harus lebih fokus pada konten yang lebih baik.

Terkait dengan keterbatasan gawai dan kuota internet, Komisi E DPRD Jateng juga telah mengusulkan kepada pemerintah agar dana BOS bisa digunakan untuk pengadaan keduanya. Lantaran gawai dan kuota internet masuk dalam sarana-prasarana belajar siswa.

(Disampaikan oleh anggota Komisi E DPRD Jateng kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman)